

**AKSELERASI PENGEMBANGAN WISATA HALAL BERBASIS
BUDAYA DAN POTENSI DAERAH ACEH DENGAN PRINSIP
MODERASI DAN PENGEMBANGAN UMKM**

Nurkhalis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, Indonesia

E-mail: khalisnurkhalis@yahoo.com

ABSTRAC

The halal tourism program created by Aceh Province is a regional advantage and uniqueness for developing tourism potential that is adapted to culture, religious values and customs. However, the development of halal tourism does not yet have a concrete plan, has not been able to increase the participation of all stakeholders and is in accordance with the development of regional and cultural potential so that the number of tourists coming to Aceh Province is still concentrated in certain areas, for example Sabang, Banda Aceh and North Aceh, while In other areas, tourist visits have not been carried out optimally. Thus, the aim of this study is to develop a strategy to accelerate the development of halal tourism based on Aceh's regional and cultural potential with the principles of moderation and development of MSMEs. The methodology used in this study is to use a qualitative approach and SWOT analysis. The results of the study are 1) the strategy for developing halal tourism is carried out by maximizing strengths as internal potential to minimize the threat of failure to implement the halal tourism program in Aceh Province, 2) the implementation of the strategy in developing halal tourism is to analyze and manage tourism including planning, organizing, implementing and evaluating ; increase community participation; identify Aceh's potential by creating a grand design and promoting halal tourism both through conventional and online methods. Conclusion: The development of halal tourism requires synergy and commitment from all sectors, namely political, economic, social, technological, environmental and regulatory.

Key words: *Halal Tourism, Strategy, Collaborative Governance, Community Participation, Regional Potential*

ABSTRAK

Program wisata halal yang dibuat oleh Provinsi Aceh merupakan keunggulan dan keunikan daerah untuk melakukan pengembangan potensi wisata yang disesuaikan

dengan budaya, nilai-nilai agama dan adat istiadat. Namun, pengembangan wisata halal tersebut belum mempunyai perencanaan konkret, belum dapat meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder dan sesuai pengembangan potensi daerah serta budaya sehingga jumlah wisatawan yang datang pada Provinsi Aceh masih terpusat pada daerah-daerah tertentu, misalnya Sabang, Banda Aceh dan Aceh Utara, sedangkan pada daerah lain kunjungan wisata belum dilakukan secara optimal. Dengan demikian tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk mengembangkan strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan wisata halal berbasis potensi daerah dan budaya Aceh dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT. Hasil kajian adalah 1) strategi pengembangan wisata halal dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan sebagai potensi internal untuk meminimalisir ancaman kegagalan implementasi program wisata halal di Provinsi Aceh, 2) implementasi strategi dalam pengembangan wisata halal adalah membuat analisa dan pengelolaan wisata meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi; meningkatkan partisipasi masyarakat; melakukan identifikasi potensi Aceh dengan membuat grand desain dan melakukan promosi wisata halal baik melalui metode konvensional maupun online. Kesimpulan pengembangan wisata halal membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh sektor yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan regulasi.

Kata Kunci: Wisata Halal, Strategi, *Collaborative Governance*, Peran Serta Masyarakat, Potensi Daerah.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak mempunyai potensi wisata alam, wisata buatan dan wisata kuliner. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada kajian Mulyati et al., (2018) bahwa Provinsi Aceh mempunyai banyak potensi yakni baik dalam bidang industri, sejarah budaya dan lainnya. Kajian yang dilakukan oleh Dwi & Liana (2018) bahwa Aceh mempunyai potensi alam dan potensi buatan yang tersebar di seluruh wilayah. Selain potensi tersebut

di atas, terdapat pula potensi keunikan budaya, cita rasa kopi, atmosfer warung kopi, dan budaya Islami sehingga dapat membuat branding wisata halal (Saleh & Anisah, 2019). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh Aceh merupakan nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Selain mempunyai potensi, Provinsi Aceh juga mempunyai budaya yang kental, khususnya budaya Islami yang dirasakan hampir pada seluruh

aktivitas kehidupan. Nilai-nilai budaya merupakan identitas budaya yang terbentuk melalui faktor kepercayaan, bahasa dan pola perilaku (Verulitasari & Cahyono, 2016). Adanya potensi dan budaya Aceh tersebut, maka menimbulkan minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Aceh. Menurut jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Aceh pada Bulan Januari 2024 sebesar 2.389 orang, angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Aceh pada Bulan Januari 2024 mengalami penurunan 11,74 poin pada 24,23% dibandingkan Bulan Desember 2023. Jumlah wisatawan nusantara pada Bulan Desember 2023 berjumlah 42.969 orang, sedangkan jumlah wisatawan nusantara pada Bulan November 2023 berjumlah 43.957 orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024). Jumlah pengunjung wisatawan nusantara dari tahun 2018-2022 terpusat pada daerah-daerah tertentu seperti halnya Sabang, Banda Aceh dan Aceh Utara sedangkan daerah lain mempunyai jumlah pengunjung wisatawan Nusantara dengan jumlah kecil, kondisi yang sama juga terjadi pada kunjungan wisatawan mancanegara yang mempunyai jumlah tertinggi pada daerah Sabang, sedangkan daerah lain sangat kecil (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023).

Berdasarkan pada jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang mengunjungi Aceh dengan angka yang

fluktuatif, maka perlu dilakukan pengembangan wisata Aceh dengan berbasis potensi dan budaya Aceh sehingga jumlah wisatawan akan terus bertambah.

Pengembangan wisata berbasis budaya dan potensi Aceh akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan kerja baru dan potensi usaha baru seperti halnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Hanifah & Fitriyah, 2018). Adanya keunggulan pengembangan wisata khususnya dalam hal ekonomis, maka pariwisata di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dalam Pasal 3 Poin b yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi nilai sejarah dan budaya Aceh khususnya budaya Islami sebagai daya tarik wisata. Aceh juga mempunyai Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yakni aturan yang memberikan jaminan kehalalan semua produk yang beredar di Aceh. Adanya aturan mengenai kepariwisataan tersebut dijadikan sebagai keistimewaan Aceh dalam hal pengelolaan pariwisata.

Untuk melakukan pengembangan wisata Aceh terdapat sejumlah kendala seperti halnya yang telah dibuktikan dalam beberapa kajian berikut.

1. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pengembangan wisata khususnya

wisata halal yang dikembangkan di Aceh (Sulaeman & Afaza, 2019).

2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia bagi aparatur yang melakukan pengelolaan wisata ketika dilakukan kajian atas pengembangan wisata halal ditinjau dari dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata serta dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia (Santoso et al., 2021)
3. Kurangnya anggaran untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pariwisata saat dilakukan kajian mengenai pengembangan dimensi sarana prasarana (Santoso et al., 2021).
4. Kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia pengelola pariwisata dan kurangnya langkah konkret dalam pengembangan pariwisata yang diwujudkan dengan tindakan nyata (Irwansyah & Zaenuri, 2021).
5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam hal promosi dan menjaga keamanan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung (Nirwana & Mistar, 2022).
6. Kurangnya partisipasi dari pelaku industri pariwisata di Aceh (Maulida, 2019).

Berdasarkan kelemahan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian dalam hal pengembangan wisata yakni dengan

cara melakukan akselerasi dengan melibatkan masyarakat sekitar. Untuk melakukan pelibatan masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata masih terdapat kelemahan yakni kurangnya peran masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ekspresi budaya tradisional karena kurangnya anggaran, pelestarian ekspresi budaya tradisional justru dilakukan oleh lembaga adat di Aceh (Yulia, 2019). Adanya kondisi kurangnya peran serta masyarakat dalam ekspresi budaya, dapat ditindaklanjuti dengan upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam hal keragaman budaya sehingga memperoleh penghargaan sebagai Kantor Wilayah Kementerian dengan Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya Tertinggi pada tahun 2023 (Yahya, 2023). Dengan adanya penghargaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mempunyai komitmen yang tinggi dalam hal penerimaan umat beragama dalam keragaman budaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh sudah mempunyai tingkat toleransi yang tinggi dalam menyikapi keragaman budaya dan agama.

Menyikapi adanya potensi daerah, budaya dan sistem sosial yang sudah tertata khususnya dalam hal toleransi dan kerjasama antar umat beragama, maka perlu untuk menciptakan strategi guna melakukan pengembangan wisata berbasis potensi daerah dan budaya dengan prinsip moderasi dan

pengembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adanya inisiasi untuk menciptakan strategi guna pengembangan wisata berbasis potensi daerah dan budaya dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM, maka perlu dilakukan identifikasi masalah guna mencari akar masalah sebagai dasar pembuatan strategi. Adapun identifikasi masalah yang muncul dari kondisi faktual pengembangan pariwisata di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut.

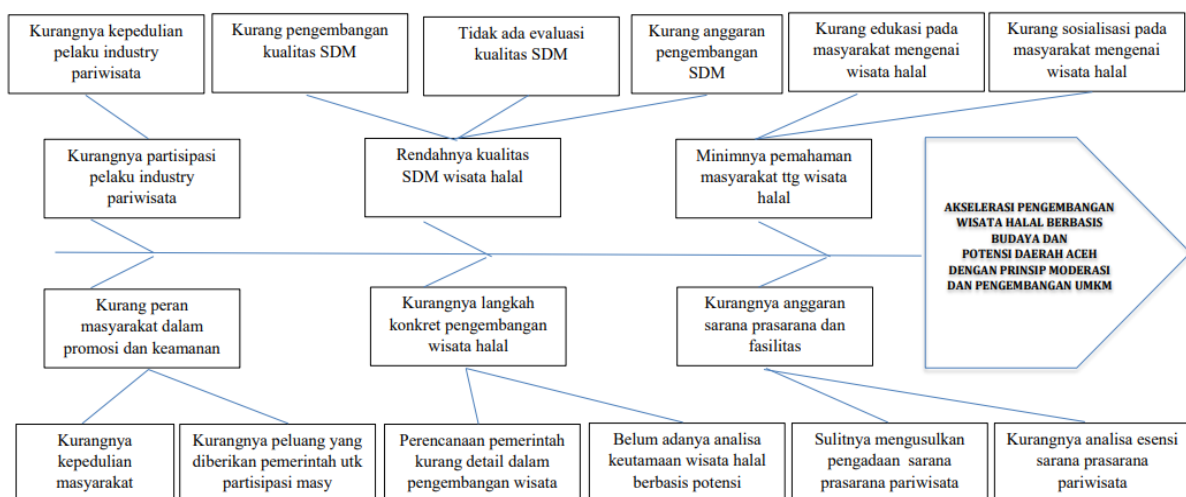
1. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pengembangan wisata khususnya wisata halal. Adapun akar masalah yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai wisata halal dan keuntungannya.
 - b. Kurangnya edukasi pada masyarakat mengenai wisata halal.
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia bagi aparatur yang melakukan pengelolaan wisata halal. Akar masalah dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Kurangnya pengembangan sumber daya manusia pengelola wisata halal di Provinsi Aceh.
 - b. Tidak adanya evaluasi mengenai kualitas sumber daya manusia pengelola wisata halal di Provinsi Aceh.
- c. Kurangnya anggaran untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia.
3. Kurangnya anggaran untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pariwisata. Akar masalah untuk permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Kurangnya analisa mengenai arti penting sarana prasarana dan fasilitas penunjang pariwisata.
 - b. Sulitnya mengusulkan pengadaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pariwisata karena adanya kebutuhan pemerintah lain yang lebih penting.
4. Kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal pengembangan langkah konkret dalam pengembangan pariwisata. Adapun akar masalahnya adalah sebagai berikut.
 - a. Pemerintah belum menilai potensi wisata sebagai potensi penting yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - b. Kurang detailnya rencana untuk melakukan pengembangan pariwisata halal sesuai dengan potensi dan budaya.
5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam hal promosi

dan menjaga keamanan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan pengunjung. Akar masalah untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya peluang yang diberikan oleh pemerintah dalam hal partisipasi masyarakat.
 - b. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pengembangan wisata halal oleh pemerintah daerah Aceh
6. Kurangnya partisipasi dari pelaku industri pariwisata halal di Aceh halal.
- a. Kurangnya kepedulian pelaku industry dalam program wisata halal.

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah yang akan diangkat pada kajian ini adalah pembuatan strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan wisata halal berbasis potensi daerah dan budaya Aceh dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM. Penggunaan potensi daerah sebagai salah satu variable dalam pengembangan wisata halal karena Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan kaya potensi baik potensi alam,

Berdasarkan pada uraian akar masalah tersebut, maka dapat diilustrasikan dengan menggunakan fish bone diagram sebagai berikut;



Gambar 1. Fish Bone Diagram

kuliner dan lainnya, disamping kekayaan budaya Aceh yang beranekaragam. Disisi lain, dengan terpilihnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai peraih Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya Tertinggi pada tahun 2023, maka hal tersebut merupakan prestasi masyarakat Aceh dalam hal menjaga toleransi dalam keragaman. Tujuan akhir dalam hal pengembangan wisata halal adalah pengembangan UMKM karena pariwisata akan meningkatkan peran masyarakat khususnya dalam hal ekonomi dalam bentuk pengembangan UMKM. Dengan demikian, untuk mewujudkan pengembangan wisata halal tersebut dibutuhkan strategi sehingga dapat mengkolaborasi seluruh variable tersebut dalam sebuah perencanaan pengembangan wisata yang sesuai untuk daerah Aceh.

Adapun tujuan dilakukan pengembangan wisata halal adalah untuk mengembangkan strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan wisata halal berbasis potensi daerah dan budaya Aceh dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM.

Manfaat dilakukan kajian pengembangan wisata halal adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan khususnya pengembangan wisata halal yang sedang gencar dilaksanakan di

Aceh sebagai bentuk pengembangan potensi wisata sesuai dengan budaya Aceh yang Islami.

2. Manfaat praktis

Hasil kajian ini di dapat memberikan kontribusi pada pencarian solusi mengenai akselerasi pengembangan wisata halal di Aceh yang masih mempunyai kendala khususnya dalam hal pemberdayaan potensi daerah, budaya, nilai moderasi dan pengembangan UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan *grand theory* yakni teori organisasi, sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah teori *governance* dan *applied theory* berupa *collaborative governance*. Teori organisasi menguraikan tentang ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi mempunyai fokus pada perilaku organisasi dan keefektifan organisasi (Stephen P Robbins & Judge, 2018). Menguraikan mengenai perilaku organisasi tidak dapat dipisahkan dari tata pemerintahan atau *governance* yakni tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi dalam melakukan pengelolaan urusan negara yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga sehingga masyarakat dan kelompok masyarakat dapat menyampaikan kepentingannya dengan

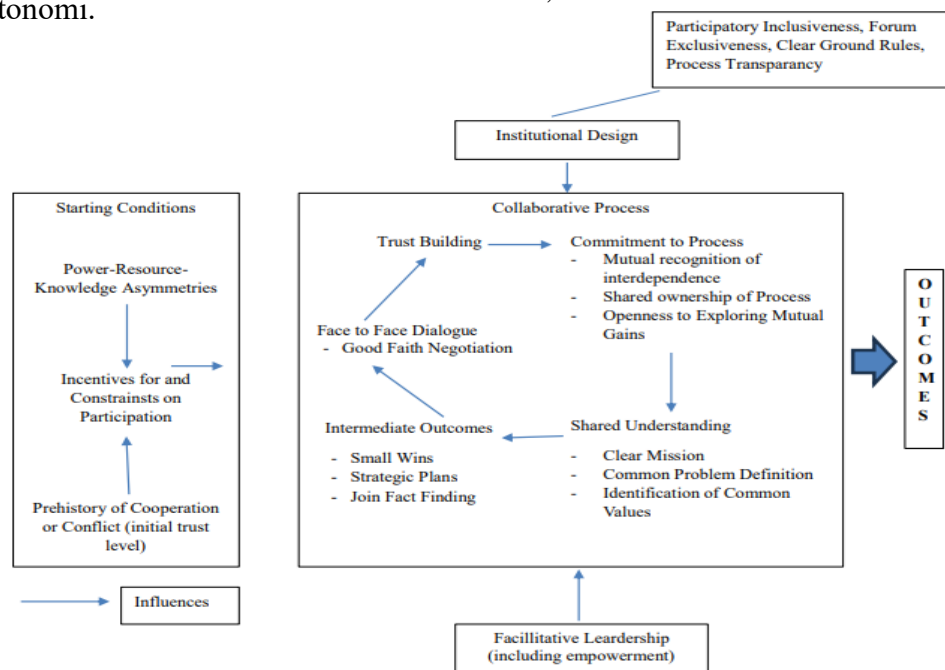
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan (Sedarmayanti & Aziz, 2020).

Untuk menerapkan konsep *governance* dibutuhkan 5 (lima) aspek yakni sebagai berikut.

1. Mengacu pada seperangkat institusi dan aktor dari pemerintah maupun non pemerintah.
2. Melakukan identifikasi atas kaburnya batas dan tanggungjawab dalam hal pencarian solusi masalah sosial dan ekonomi.
3. Melakukan identifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antar lembaga yang terlibat.
4. Merupakan jaringan actor pemerintahan yang mempunyai otonomi.

5. Mengakui adanya kapasitas dalam hal penyelesaian suatu masalah yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau otoritas pemerintah (Ulum & Ngindana, 2017).

Pada upaya untuk melakukan tata pemerintahan dibutuhkan pelibatan aktor lain yakni pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk *collaborative governance* (Ansell & Alison, 2008). *Collaborative governance* merupakan proses kerjasama dengan mengkolaborasikan keterlibatan *state actor* dan *non state actor* yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam proses pembuatan kebijakan (Garvera et al., 2021). Untuk melakukan kolaborasi dengan *non state actor* ditemukan suatu tahapan model kolaborasi untuk menjadi strategi dalam pengelolaan urusan publik, sebagai berikut;



Gambar 2. Model Collaborative Governance Ansel & Gash
Sumber : Islamy (2018)

Kajian ini dilakukan karena adanya inisiasi dan kebutuhan untuk mengembangkan pariwisata halal pada daerah Aceh yang mempunyai budaya Islami. Pembangunan wisata halal sudah dilakukan pada masing-masing daerah, namun pengembangan tersebut belum optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya perencanaan detail untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Hal ini sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Ramadani & Navia (2019) pengembangan wisata dilakukan sesuai potensi daerah, misal pengembangan wisata mangrove di Langsa. Pengembangan wisata juga dapat dilakukan dengan pengembangan manajemen masjid berbasis ekonomi karena masyarakat Aceh sangat identik dengan kegiatan kemasjidan (Amri et al., 2022).

Kajian tersebut sejalan dengan Abidin et al., (2012) pengembangan kawasan wisata minapolitan untuk daerah perikanan di Aceh Besar, Bireun, Aceh Jaya namun pengelolaan wisata tersebut belum maksimal karena belum adanya perencanaan pengembangan wisata minapolitan dengan detail. Perencanaan pembangunan wisata dapat dilakukan dengan mendetailkan program kepariwisataan yang merupakan panduan rencana, investasi, pengendalian rencana dalam pelaksanaan pengembangan dan evaluasi (Bahrudin, 2017). Pengembangan wisata halal yang dilakukan *branding* oleh Pemerintah

Aceh perlu dilakukan perencanaan dan pengembangan konsep halal yang lebih konkret dengan menerbitkan grand design sehingga arah kebijakan wisata halal semakin nyata (Saleh & Anisah, 2019). Pengembangan wisata tidak hanya membutuhkan dokumen perencanaan tetapi pendampingan masyarakat sekitar daerah wisata sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan inovasi serta peran (Arsyad et al., 2024). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dibutuhkan implementasi *collaborative governance*, namun pada kajian yang dilakukan oleh Garvera et al., (2021) hambatan implementasi *collaborative governance* adalah kurangnya komitmen, kurangnya informasi dan masih adanya struktur organisasi dengan hirarki mendominasi yang dimiliki oleh *state actor*.

METODE

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni berupa hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang terdiri dari pengambil keputusan untuk pengembangan wisata halal yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh,

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta ketua paguyuban pelaku industry periwisata. Adapun data sekunder yang digunakan adalah dokumen atau laporan BPS, jurnal dan referensi pendukung lainnya. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan analisis sumber. Data dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT Akselerasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Potensi Daerah dan Budaya dengan Prinsip Moderasi dan Pengembangan UMKM.

Analisis SWOT dilakukan dengan mengakomodir inspirasi stakeholder yang menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) dalam acara akselerasi pengembangan wisata halal berbasis potensi daerah dan budaya dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM.

Adapun peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang. Adapun hasil identifikasi dan penghitungan adalah:

1. Faktor internal

Tabel 1. *Matrix Internal Factor Evaluation (IFE Matrix)*

Faktor Internal Utama	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (Strength)			
1) Adanya Potensi alam Aceh	4,9	2,1	0,2
2) Adanya potensi buatan Aceh	4,9	2,1	0,2
3) Adanya Budaya Islami masyarakat	4,9	2,3	0,2
4) Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi	4,9	2,3	0,2
5) Adanya aturan daerah (Qanun)	9,8	2,3	0,4
6) Adanya anggaran yang dialokasikan	7,3	2,2	0,3
7) Adanya kekayaan adat istiadat Aceh	2,4	2,1	0,1
8) Adanya produk asli Aceh	7,3	2,1	0,3
9) Adanya konsep pengembangan budaya	7,3	2,2	0,3
10) Adanya kekayaan alam Aceh	9,8	2,1	0,4
Total Kekuatan	63,4	21,8	2,6
Kelemahan (Weakness)			
1) Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata	2,3	2,2	0,1
2) Kurangnya sarana prasarana wisata	2,3	2,2	0,1
3) Belum adanya perencanaan konkret	2,3	2,2	0,1
4) Kurangnya peran masyarakat	4,5	2,1	0,2
5) Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal	6,8	2,2	0,3
6) Kurangnya pemberian kesempatan untuk berpartisipasi bagi masyarakat.	2,3	2	0,1
7) Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah	4,5	2,2	0,2
8) Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata	2,3	2,2	0,1
9) Tidak adanya kolaborasi antar Lembaga pengembang wisata	6,8	2,2	0,3
10) Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh	6,8	2,2	0,3
Total kelemahan	40,9	21,7	1,8
Total S-W	100	43,5	4,4

Sumber: Hasil penghitungan IFE Matrix (2024)

2. Faktor eksternal

Tabel 2. *Matrix External Factor Evaluation (EFE Matrix)*

Faktor Eksternal Utama	Bobot	Rating	Skor
Kesempatan (Opportunity)			
1) Meningkatnya jumlah wisatawan	8,7	1,3	0,4
2) Meningkatkan ekonomi masyarakat	4,3	1,7	0,2
3) Majunya UMKM	2,2	1,2	0,1
4) Majunya pariwisata halal	6,5	1,7	0,3
5) Potensi Aceh dikelola dengan optimal	2,2	1,4	0,1
6) Terkenalnya produk Aceh	2,2	1,7	0,1
7) Aceh menjadi destinasi wisata	8,7	1,9	0,4
8) Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi	2,2	1,8	0,1
9) Terkenalnya budaya Islami Aceh	2,2	1,9	0,1
10) Pendapatan daerah Aceh meningkat	4,5	1,6	0,2
Total Kesempatan	48,5	16	2
Ancaman (Threat)			
1) Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas	6,5	1,6	0,3
2) Masyarakat tidak peduli dengan perencanaan pembangunan wisata halal	2,2	1,8	0,1
3) Jumlah wisatawan stagnan	4,3	1,9	0,2
4) Potensi wisata tidak memberikan kontribusi dengan perekonomian Aceh	8,7	1,5	0,4
5) Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah.	2,2	1,6	0,1
6) Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata.			
7) Budaya Aceh tidak dikenal	2,2	1,7	0,1
8) Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah.	4,3	1,7	0,2
9) Pariwisata halal tidak dikenal	10,9	1,7	0,5
10) Branding pariwisata halal tidak berhasil bagi pengembangan potensi wisata Aceh	8,7	1,7	0,4
	6,5	1,9	0,3
Total Ancaman	56,5	17	2,6
Total O-T	100	33	4,6

Berdasarkan pada hasil penghitungan tersebut maka dapat ditentukan kuadran: $X = 2,6 - 1,8 = 0,8$ dan $Y = 2 - 2,6 = -0,6$. Berdasarkan hasil penghitungan untuk menentukan sumbu X dan Y, maka strategi yang akan digunakan dalam implementasi kebijakan ini terletak pada kuadran 2. Kuadran 2 merupakan kuadran yang mendeskripsikan bahwa kekuatan digunakan untuk menghindari ancaman (Rangkuti & Kurniawan, 2022).



Gambar 1. Kuadran Matriks Analisis SWOT

Dengan demikian, maka diperlukan strategi sehingga dapat menggunakan seluruh potensi berupa kekuatan untuk mencapai peluangnya. Stable Growth Strategi dalam menentukan strategi perkembangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Syafa'at & Wahid, 2020).

Tabel 3. Matrik IFAS-EFAS

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Potensi alam Aceh Adanya potensi buatan Aceh Adanya Budaya Islami masyarakat Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi Adanya aturan daerah (Qanun) Adanya anggaran yang dialokasikan Adanya kekayaan adat istiadat Aceh Adanya produk asli Aceh Adanya konsep pengembangan budaya Adanya kekayaan alam Aceh <p>Adanya Strength = 2,60</p>	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata Kurangnya sarana prasarana wisata Belum adanya perencanaan konkret Kurangnya peran masyarakat Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal Kurangnya kesempatan partisipasi masyarakat. Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata Tidak ada kolaborasi antar lembaga pengembang wisata Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh <p>Weakness = 1,8</p>
<p>Kesempatan (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatkan ekonomi masyarakat Majunya UMKM Majunya pariwisata halal Potensi Aceh dikelola dengan optimal Terkenalnya produk Aceh Aceh menjadi destinasi wisata Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi Terkenalnya budaya Islami Aceh Pendapatan daerah Aceh meningkat <p>Opportunity = 2</p>	<p>Alternatif Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi potensi pada seluruh daerah Aceh Pembuatan aturan (Qanun) sesuai dengan perencanaan pembangunan wisata halal. Pembuatan perencanaan jangka pendek menengah dan Panjang Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan wisata halal dengan seluruh umat beragama. Melakukan identifikasi adat istiadat dan budaya Aceh Pengembangan UMKM sesuai potensi daerah <p>Bobot Strength-Opportunity = 4,60</p>	<p>Alternatif Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan wisata. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana wisata. Identifikasi peran masyarakat yang dapat ditawarkan pemerintah. Membuat regulasi dalam implementasi collaborative governance. Sosialisasi wisata halal dan keutamaannya pada seluruh pelaku industry dan masyarakat. Membuat forum komunikasi pengembangan wisata halal. <p>Bobot Weakness-Opportunity = 3,8</p>
<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas Masyarakat tidak peduli dengan pembangunan wisata halal Jumlah wisatawan stagnan Potensi wisata tidak berkontribusi dengan perekonomian Aceh Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah. Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata. Budaya Aceh tidak dikenal Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah. Pariwisata halal tidak dikenal Branding pariwisata halal tidak berhasil <p>Threat = 2,6</p>	<p>Alternatif Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan analisa wisata halal, pengelolannya, dan tujuannya. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat pada pengembangan wisata halal. Melakukan identifikasi potensi Aceh yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikembangkan. Melakukan analisa dan pembuatan grand desain wisata halal untuk seluruh potensi dan budaya Aceh. Melakukan promosi wisata halal dan keunikannya. <p>Bobot Strength-Threat = 5,2</p>	<p>Alternatif Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing wisata yang akan dikembangkan. Pengembangan inovasi berdasarkan potensi Aceh. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata halal Melakukan analisa peluang ekonomi dari pengembangan wisata halal <p>Bobot Weakness-Threat = 4,40</p>

Tabel 4. Strategi Prioritas

<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Potensi alam Aceh Adanya potensi buatan Aceh Adanya Budaya Islami masyarakat Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi Adanya aturan daerah (Qanun) Adanya anggaran yang dialokasikan Adanya kekayaan adat istiadat Aceh Adanya produk asli Aceh Adanya konsep pengembangan budaya Adanya kekayaan alam Aceh 	<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas Masyarakat tidak peduli dengan pembangunan wisata halal Jumlah wisatawan stagnan Potensi wisata tidak berkontribusi dengan perekonomian Aceh Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah. Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata. Budaya Aceh tidak dikenal Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah. Pariwisata halal tidak dikenal Branding pariwisata halal tidak berhasil
<p>Alternatif Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan analisa wisata halal, pengelolannya, dan tujuannya. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat pada pengembangan wisata halal. Melakukan identifikasi potensi Aceh yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikembangkan. Melakukan analisa dan pembuatan grand desain wisata halal untuk seluruh potensi dan budaya Aceh. Melakukan promosi wisata halal dan keunikannya. 	
<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Potensi alam Aceh Adanya potensi buatan Aceh Adanya Budaya Islami masyarakat Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi Adanya aturan daerah (Qanun) Adanya anggaran yang dialokasikan Adanya kekayaan adat istiadat Aceh Adanya produk asli Aceh Adanya konsep pengembangan budaya Adanya kekayaan alam Aceh 	<p>Kesempatan (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatkan ekonomi masyarakat Majunya UMKM Majunya pariwisata halal Potensi Aceh dikelola dengan optimal Terkenalnya produk Aceh Aceh menjadi destinasi wisata Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi Terkenalnya budaya Islami Aceh Pendapatan daerah Aceh meningkat
<p>Alternatif Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi potensi pada seluruh daerah Aceh Pembuatan aturan (Qanun) sesuai dengan perencanaan pembangunan wisata halal. Pembuatan perencanaan jangka pendek menengah dan Panjang Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan wisata halal dengan seluruh umat beragama. Melakukan identifikasi adat istiadat dan budaya Aceh Pengembangan UMKM sesuai potensi daerah 	
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata Kurangnya sarana prasarana wisata Belum adanya perencanaan konkret Kurangnya peran masyarakat Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal Kurangnya kesempatan partisipasi masyarakat. Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata Tidak ada kolaborasi antar lembaga pengembang wisata Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh 	<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas Masyarakat tidak peduli dengan pembangunan wisata halal Jumlah wisatawan stagnan Potensi wisata tidak berkontribusi dengan perekonomian Aceh Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah. Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata. Budaya Aceh tidak dikenal Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah. Pariwisata halal tidak dikenal Branding pariwisata halal tidak berhasil
<p>Alternatif Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing wisata yang akan dikembangkan. Pengembangan inovasi berdasarkan potensi Aceh. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata halal Melakukan analisa peluang ekonomi dari pengembangan wisata halal 	

<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata 2. Kurangnya sarana prasarana wisata 3. Belum adanya perencanaan konkret 4. Kurangnya peran masyarakat 5. Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal 6. Kurangnya kesempatan partisipasi masyarakat. 7. Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah 8. Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata 9. Tidak ada kolaborasi antar lembaga pengembang wisata 10. Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh 	<p>Kesempatan (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah wisatawan 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat 3. Majunya UMKM 4. Majunya pariwisata halal 5. Potensi Aceh dikelola dengan optimal 6. Terkenalnya produk Aceh 7. Aceh menjadi destinasi wisata 8. Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi 9. Terkenalnya budaya Islami Aceh 10. Pendapatan daerah Aceh meningkat
<p>Alternatif Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan wisata. 2. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana wisata. 3. Identifikasi peran masyarakat yang dapat ditawarkan pemerintah. 4. Membuat regulasi dalam implementasi collaborative governance. 5. Sosialisasi wisata halal dan keutamaannya pada seluruh pelaku industry dan masyarakat. 6. Membuat forum komunikasi pengembangan wisata halal. 	

Sumber: Olah data (2024)

Pilihan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan SWOT dan matrik IFAS EFAS, maka dapat diketahui bahwa dari penghitungan tersebut terdapat pilihan atau alternatif strategi yang dapat digunakan yakni S-T, S-O, W-T dan W-O. Pilihan strategi tersebut diurutkan berdasarkan skala prioritas yang diperoleh dari hasil pengisian responden pada saat FGD pengembangan wisata halal.

Menurut alternatif strategi yang paling prioritas berdasarkan matrik IFAS dan EFAS adalah strategi strength-threat yakni strategi yang menggunakan potensi berupa kekuatan untuk meminimalisir terjadinya ancaman dalam pengembangan wisata halal. Adapun rangkaian strategi yang dapat diimplementasikan pada kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembuatan analisa wisata halal, pengelolaannya, dan tujuannya. Untuk melakukan pengembangan wisata halal, harus dilakukan analisa mengenai konsep wisata halal melalui pembuatan *grand desain*. Selanjutnya untuk

melakukan perencanaan yang konkret pada pengembangan wisata halal maka perlu dilakukan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, yakni sebagai berikut.

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, perlu dilakukan identifikasi potensi Aceh baik potensi alam maupun potensi buatan yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Potensi tersebut ditelaah dari sisi kekayaan ekonomis yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Selain melakukan identifikasi potensi, juga dilakukan identifikasi budaya dan adat istiadat yang dapat dikembangkan sebagai pertunjukan wisata. Disisi lain, untuk melakukan perencanaan perlu dilakukan observasi mengenai potensi UMKM yang berkembang pada kawasan wisata halal khususnya dalam

hal memanfaatkan potensi daerah dan budaya.

Perencanaan yang dilakukan tidak hanya merencanakan program wisata halal tetapi juga anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan wisata halal, termasuk juga melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas pengembangan wisata. Pada pembuatan perencanaan, perlu melakukan sinkronisasi antara perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan yang berkelanjutan akan mempermudah mewujudkan program wisata halal. Disisi lain, dalam melakukan perencanaan perlu melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder lain.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan melakukan penentuan tugas masing-masing instansi dan lembaga yang berperan pada pengembangan wisata halal. Pengorganisasian dilakukan untuk pembagian tugas dalam pengembangan wisata halal sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan potensi SDM dan standar sesuai peraturan.

c. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh perencanaan diimplementasikan

dengan tindakan konkret sehingga konsep perencanaan wisata halal dapat direalisasikan.

d. Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan dengan menilai kinerja yakni membandingkan antara perencanaan dengan realisasi pengembangan wisata halal.

Pengelolaan wisata halal yang akan diimplementasikan sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Kuswandi (2020) bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan pariwisata perlu melakukan identifikasi potensi wisata, penetapan destinasi wisata unggulan, perumusan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, pelibatan stakeholder, pembangunan sarana prasarana, promosi wisata, menjaliki kemitraan dan peningkatan sumber daya manusia.

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat pada pengembangan wisata halal.

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal pembangunan wisata, tidak dapat dilepaskan dari peran *stakeholder*. Adapun strategi pemerintah daerah dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui *collaborative governance*.

Implementasi *collaborative governance* sebagaimana diungkapkan oleh Islamy (2018) dapat dideskripsikan dalam implementasi kajian sebagai berikut.

a. Dialog tatap muka

Komunikasi merupakan dasar dari adanya *collaborative governance*, hal ini disebabkan *collaborative governance* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaring aspirasi, pemikiran dan keterlibatan aktif masyarakat dan swasta untuk membuat kebijakan. Dengan demikian dibutuhkan banyak tatap muka dan dialog sehingga stakeholder eksternal yakni masyarakat dan swasta tidak hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap implementasi dan evaluasi.

Pelibatan masyarakat bukan hanya formalitas untuk menggugurkan perencanaan partisipatif tetapi digunakan untuk stabilitas pembuatan kebijakan yang tidak hanya didominasi oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Rakhmadani (2021) bahwa pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan wisata dilakukan dengan beberapa

kegiatan yakni survey dan penggalian potensi, penyusunan program dan identifikasi masalah, sosialisasi program berbasis pendekatan, pembangunan, pelatihan dan pendampingan wisata serta monitoring evaluasi.

Adapun implementasi pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi pengembangan wisata halal berbasis potensi daerah dan budaya dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM adalah sebagai berikut;

Table 5. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Hasil	Sasaran
Survey dan penggalian potensi	Melakukan survey dan kunjungan pada daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata	Masyarakat.
Penyusunan program & identifikasi masalah	Melakukan identifikasi masalah, dan membuat program berdasarkan potensi dan budaya	Masyarakat
Sosialisasi program berbasis pendekatan	Melakukan sosialisasi program berbasis pemberdayaan potensi dan budaya	Pimpinan daerah Masyarakat
Pembangunan, pelatihan dan pendampingan	Melakukan pembangunan fisik daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, menghadirkan narasumber dan pendamping bidang kepariwisataan untuk melakukan pendampingan pengelolaan wisata	Masyarakat
Evaluasi dan monitoring	Melakukan evaluasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, evaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya program dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari implementasi program	Masyarakat

Berdasarkan pada uraian pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Tabel 5,

- maka pemberdayaan masyarakat akan termonitor dengan baik.
- b. Membangun kepercayaan
Pada implementasi *collaborative governance* sering terjadi saling curiga antar *stakeholder*, dengan demikian rasa curiga tersebut harus dijumpai dengan menggunakan komunikasi, negosiasi, diskusi dan kolaborasi. Dengan demikian adanya rasa egosentrisme antar *stakeholder* dapat diminimalisir dan meningkatkan kepercayaan antar *stakeholder* bahwa tujuan dibuatnya pengembangan wisata bukan hanya untuk keuntungan satu pihak tetapi untuk pemerintah dan masyarakat serta swasta.
 - c. Komitmen terhadap proses
Komitmen selalu berkorelasi dengan proses kolaborasi. Komitmen dinilai sebagai motivasi untuk partisipasi dalam *collaborative governance*. Untuk meningkatkan komitmen dibutuhkan pimpinan yang selalu memberikan motivasi dan menyadarkan pada *stakeholder* bahwa pengembangan wisata adalah untuk kemajuan Provinsi Aceh dan masyarakat yang diikuti dengan pemberian keteladanan.
 - d. Pemahaman Bersama
Pemahaman bersama perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh *stakeholder* yang terlibat pada *collaborative governance*. Pemahaman diciptakan dengan memberikan pengetahuan capaian apa yang akan diperoleh jika program pengembangan wisata halal dapat dilaksanakan melalui kolaborasi yakni adanya pengembangan potensi daerah dan budaya sehingga UMKM dan moderasi berkembang karena dalam pengembangan suatu program membutuhkan kolaborasi dari seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, suku dan agama.
- Hasil sementara
Hasil sementara merupakan hasil yang dicapai sebagai wujud kolaborasi dalam bentuk *output* dan *outcome*. Hasil tersebut dapat dilakukan evaluasi Bersama untuk meningkatkan implementasi program tahap selanjutnya.
3. Melakukan identifikasi potensi Aceh yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikembangkan.
Setelah melakukan analisa dan pengelolaan wisata halal sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengelolaan meliputi implementasi fungsi manajemen dan membangun partisipasi masyarakat, maka tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi yang ada pada masing-masing daerah secara detail. Identifikasi potensi dilakukan dengan melakukan pendataan atas potensi alam, potensi buatan, produk asli daerah, budaya yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dilakukan kajian atas potensi tersebut. Hal tersebut sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Marliani et al., (2022) bahwa potensi wisata

perlu dilakukan penataan sehingga dapat dikembangkan dengan optimal khususnya dalam hal dampak ekonomis dari adanya wisata tersebut.

4. Melakukan analisa dan pembuatan grand desain wisata halal untuk seluruh potensi dan budaya Aceh.

Untuk mengembangkan wisata halal tidak hanya membutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta pelibatan masyarakat, tetapi pengembangan wisata halal harus dilengkapi dengan grand desain sehingga pengembangan tersebut diperoleh kajian dari sisi ilmu pengetahuan. Analisa ini perlu dilakukan karena untuk melakukan pengembangan wisata diperlukan strategi yang membutuhkan dukungan dari sektor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan regulasi. Hal tersebut disampaikan pula dalam kajian Fasa et al., (2022) bahwa pengembangan wisata merupakan program berkesinambungan sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai sektor secara simultan.

5. Melakukan promosi wisata halal dan keunikannya.

Untuk melakukan pengembangan wisata dibutuhkan promosi wisata baik yang dilakukan secara konvensional maupun online.

Promosi tersebut fungsinya adalah memberikan informasi mengenai keberadaan suatu destinasi wisata, potensi daerah yang dapat diperoleh dari kunjungan wisata, budaya yang dapat dilihat dan dinikmati, produk yang dapat dibeli dan nilai-nilai historis dan nilai sosial lainnya yang dapat diperoleh wisatawan. Promosi yang kurang berdampak pada kurangnya informasi yang diberikan pada calon wisatawan baik wisatawan nasional maupun mancanegara.

Berdasarkan pada upaya pencapaian strategi tersebut, maka dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan strategi perlu dilakukan analisa, perencanaan konkret dan pelibatan masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan wisata halal di Provinsi Aceh dilakukan dengan strategi memperkuat potensi yakni berupa kekuatan atau *strength* untuk meminimalisir terjadinya ancaman. Dengan demikian, potensi internal untuk pengembangan wisata yang meliputi potensi, budaya Islami, moderasi beragama, aturan daerah (qanun), anggaran, adat istiadat, produk asli daerah, konsep pengembangan budaya dan kekayaan alam harus diidentifikasi dan dianalisa

sehingga pengembangan wisata dapat dilakukan tepat sasaran.

2. Strategi *strength-threat* diimplementasikan dengan pembuatan analisa wisata halal, pengelolaan dan tujuannya, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta, identifikasi potensi pada masing-masing daerah, pembuatan grand desain dan melakukan promosi wisata. Disisi lain, untuk melakukan pengembangan wisata halal juga dibutuhkan dukungan dari sektor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan regulasi secara simultan karena pengembangan wisata halal tersebut tidak dapat dilakukan jika ada beberapa sektor yang tidak memberikan dukungan.

Kajian ini direkomendasikan pada beberapa pihak berikut.

1. Gubernur
Pengembangan wisata halal merupakan keunikan dari Provinsi Aceh karena pariwisata identik dengan aktivitas bersenang-senang yang sering kali melupakan nilai agama dan budaya, namun pada Provinsi Aceh aktivitas wisata dikemas dengan sentuhan nilai agama dan budaya. Gubernur Aceh harus dapat mensinergikan seluruh instansi publik yang ada di Provinsi Aceh, instansi swasta dan masyarakat serta organisasi masyarakat untuk saling

berpartisipasi dalam pengembangan wisata halal sesuai dengan bidang kerja pada masing-masing instansi dan kegiatan masyarakat lainnya. Untuk melakukan pengembangan wisata halal, Gubernur Aceh harus mempunyai komitmen yang diwujudkan pada keterlibatan langsung pada saat penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Disisi lain, Gubernur Aceh harus dapat mensinergikan seluruh bupati dan walikota untuk melakukan pemberdayaan potensi wisata secara massif yang dilengkapi dengan penataan sektor politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan serta regulasi.

2. Bupati dan Walikota
Seluruh bupati dan walikota yang ada di Provinsi Aceh harus bersinergi dengan program pemerintah provinsi khususnya dalam pengembangan wisata halal dari sektor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan regulasi.
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh harus dapat membuat grand desain untuk program wisata halal yang sudah dikomunikasikan dengan dinas pariwisata kabupaten/kota sehingga arah pengembangan wisata halal pada

- Provinsi Aceh akan saling bersinergi dengan seluruh pengembangan wisata halal yang ada di kabupaten/kota.
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh harus dapat mengembangkan grand desain mengenai peran UMKM dalam hal pengembangan wisata halal, produk dan usaha apa yang potensial dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Untuk melakukan penjangkaran aspirasi dari pengembangan UMKM tersebut maka dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan dinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
 5. Kepala Bappeda Provinsi Aceh
Kepala Bappeda Provinsi Aceh harus dapat bersinergi dengan instansi publik yang lain dengan cara membentuk forum komunikasi pengembangan wisata halal pada Provinsi Aceh, tujuannya adalah perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dibuat oleh Bappeda sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Aceh serta pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Amri, A., Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1115–1123.
- Ansell, C., & Alison, G. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsyad, M., Suaib, E., Amir, M., Ridwan, H., Abdullah, H., Tjoetra, A., Lensoni, L., & Anto, R. P. (2024). Pendampingan Masyarakat Pesisir sebagai Trigger Wisata Lokal Potensial. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 137–148. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i1.3637>
- Badan Pusat Statistik. (2024). No. 14/03/11/Th. XXVII, 01 Maret 2024. In *BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH* (Issue 14). <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2024/03/01/1439/selama-bulan-januari-2024-terdapat-17-196-kunjungan-wisman-ke-jawa-timur-melalui-pintu-masuk-juanda.html>
- Bahrudin, A. (2017). Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah). *MIMBAR ADMINISTRASI*, 1(1). <https://doi.org/10.9769/epj.2012.4.2.df>
- Dwi, A., & Liana, Y. (2018). Potensi Daya Tarik Wisata Air Terjun Bur Bulet Sebagai Daya Tarik Wisata

- Alam Di Takengon Aceh Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 31–37.
- Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., & Prasetio, A. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia: Pendekatan Analisis Pestel. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 27(1), 71–87.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
- Hanifah, L., & Fitriyah, A. (2018). PENGEMBANGAN WISATA PANTAI 9 GILIGENTING DALAM UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. *Agri-Sosial Ekonomi*, 14(3), 335–364.
- Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107>
- Islamy, S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Budi Utama.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Marliani, L., Hidayat, E. S., & Defiana, Y. (2022). Abdimas Galuh. *Abdimas Galuh*, 4(2), 779–788.
- Maulida, D. (2019). TOURISM DESTINATION BRANDING: ANALISIS STRATEGI BRANDING WISATA HALAL “THE LIGHT OF ACEH” (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2015-2016). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.35308/source.v5i1.1171>
- Mulyati, D., Khairiadi, K., Yana, S., & ... (2018). Pengembangan Potensi Wisata di Kota Banda Aceh Dengan Analisa SWOT. *Jurnal Serambi ...*, III, 292–298. <http://www.jurnal.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/440>
- Nirwana, H., & Mistar, J. (2022). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi di Desa Wisata Gunung Pandan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Olahraga Rekreasi Samudra*, 5(2), 1–11.
- Rakhmadani, R. (2021). Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pengembangan Desa Wisata Sajen Edu Adventure melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(1), 33–44.

- <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i1.159>
- Ramadani, R., & Ilman Navia, Z. (2019). Pengembangan Potensi Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh Development of the Mangrove Forest Potential Potential in Kuala Langsa Village Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh. *Biologica*, 1(1), 41–55.
- Rangkuti, S. A., & Kurniawan, I. (2022). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 25(2), 201. <https://doi.org/10.31845/jwk.v25i2.763>
- Saleh, R., & Anisah, N. (2019). PARIWISATA HALAL DI ACEH: GAGASAN DAN REALITAS DI LAPANGAN. *SAHAFA Journal of Islamic Communication*, 1(2). <http://lifestyle.liputan6.com>
- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., Rahmaniazar, L., Hidayat, E., & Alyani, N. (2021). Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 195–208. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231>
- Sedarmayanti, & Aziz. (2020). *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0*. CV. Refika Aditama.
- Stephen P Robbins, & Judge, T. A. (2018). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sulaeman, A. R., & Afaza, H. (2019). Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh Melalui Program Wisata Halal Wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Dan Sabang. *Jurnal Al-Bayan*, 25(1), 92–115.
- Syafa'at, W., & Wahid, A. (2020). Strategi Pemasaran Produk Sepatu Menggunakan Metode Analisis Swot Dengan Matrik Ifas Dan Efas Di Pt. Bagoes Tjipta Karya. *Journal Knowledge Industrial Engineering (JKIE)*, 7(3), 108–117. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/jkie>
- Ulum, M. ., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu, Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. UB Press.
- Verulitasari, E., & Cahyono, A. (2016). Nilai Budaya Dalam Pertunjukan Rapai Geleng Mencerminkan Identitas Budaya Aceh. *Jurnal Catharsis*, 5(1), 41–47. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/catharsis>
- Yahya, M. Y. (2023). *Kanwil Kemenag Aceh Raih Penghargaan Indeks Tertinggi Penerimaan Umat*

- Beragama terhadap Keragaman Budaya dalam Acara KMBAAA. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.* <https://aceh.kemenag.go.id/baca/k-anwil-kemenag-aceh-raih-penghargaan-indeks-tertingg-penerimaan-umat-beragama-terhadap-keragaman-dalam-acara-kmbaaa>
- Yulia, Y. (2019). *Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Aceh (Indonesia)* Dan *Malaysia.* <https://repository.unimal.ac.id/6667/>
- Z. Abidin, M., Nazir, M., & Musman, M. (2012). Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan minapolitan di beberapa lokasi dalam Provinsi Aceh: suatu kajian awal. *Depik*, 1(1), 68–77. <https://doi.org/10.13170/depik.1.1.29>